

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. N. Marbun. *Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Mappi FHUI, 2020), 1–3.
- Abdul Halim & Ick Rangka Bawono (eds.). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Teori Hukum dan Korupsi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Basah, Sjachran. *Hukum Administrasi Negara dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Djaja, Ermansjah. *Tipologi Tindak Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Effendi, Erdianto. *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamami, Andi. *Hukum Pidana Khusus Tentang Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Haris, Syamsudin. *Korupsi dan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- J. C. T. Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: KPK, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Manullang, Herlina. *Hukum Pidana Korupsi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Press, 2018.

- Marbun, A. N. *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mappi FHUI, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Korupsi dan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2019.
- Rosikah & Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Stroink & Steenbeek. *Inleiding tot het Staats- en Administratief Recht*. Deventer: Kluwer, 1990.

Suyatno. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Syauket & Wijanarko. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mandar Maju, 2008.

## **Jurnal**

D., R. Eriska Ginalita. “Peran Pendidikan Tinggi terhadap Penegakan Hukum Kasus-Kasus Korupsi.” *ADHUM*, Vol. 5, No. 2 (April 2025).

“Konstruksi Unsur Objektif Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 45–50.

“Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jakarta*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 33–40.

Nurhayati, R. “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Negara.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 6–10.

Putri, C. A., dan Gunarto. “Efektivitas Pengecekan Sertifikat terhadap Pengecekan Sengketa Tanah dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1 (2018).

Rahmayanti. “Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Mercatoria*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 60–62.

Sumardani, Ni Made Rian Ayu dan I Nyoman Bagiastra. “Tanggung Jawab Secara Hukum Badan Pertanahan Nasional terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2 (Februari 2024).

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024.